

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dan Rakyat Indonesia saat ini dalam masa pembangunan bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus meningkat dan berubah ke arah yang lebih baik melalui pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan jaringan transportasi yang paling dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas, karena itu jalan merupakan peranan penting untuk mendukung kegiatan dan mensejahterkan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan dalam jangka pendek akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah dan jangka panjang akan mendukung peningkatan Efisiensi dan produktifitas sektor-sektor ekonomi terkait.

Pembangunan infrastruktur harus pula memperhatikan tiga aspek penting yaitu: aspek ekonomi, aspek sosial, serta aspek lingkungan.

Aspek Ekonomi, pembangunan infrastruktur berupa aset fisik yang dapat menyediakan jasa dan digunakan dalam proses produksi dan konsumsi final. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur jalan merupakan tumpuan dalam perkembangan ekonomi. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi yang

memadai, maka pertumbuhan ekonomi sangat sulit dicapai. Sebaliknya prasarana jalan yang buruk dan rusak, akan menghambat alokasi sumber daya serta pendistribusian faktor produksi barang dan jasa yang ada.

Aspek Sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur jalan kepada masyarakat dalam taraf perencanaan maupun pembangunan. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur jalan seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengarusutamaan gender. Sedangkan pada saat pembangunan kemungkinan masyarakat terkena dampak sehingga diperlukan proses konsultasi, pemindahan penduduk dan pemberian kompensasi, maupun permukiman kembali. Kemudian pada pasca pembangunan atau pengelolaan perlu diidentifikasi keberadaan infrastruktur jalan tersebut sehingga dapat membawa manfaat atau peningkatan taraf hidup bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Sedangkan pada Aspek Lingkungan menurut Undang-undang No. 32 tahun 2009, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia. Dampak lingkungan hidup dari perbedaan infrastruktur adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang di akibatkan oleh suatu rencana usaha kegiatan dan pembuatan/ pengadaan infrastruktur di suatu tempat. Infrastruktur, baik jalan maupun bangunan dapat turut membantu memperbaiki/melestarikan dan merusak lingkungan alam yang ada. Dampak infrastruktur terhadap pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat

memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan nomenklatur undang-undang tersebut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya dampak terhadap pelestarian lingkungan hidup dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Agar bencana alam tersebut tidak terjadi, maka manusia harus berhenti mengeksploitasi lingkungan dan mulai melakukan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya untuk melakukan antisipasi terhadap setiap kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur. Sedangkan dampak terhadap penghancuran lingkungan hidup, tentunya infrastruktur seperti ini akan dapat terwujud tanpa dukungan dari semua pihak terutama para infestor jika tidak memiliki tujuan yang sama.

Dari ketiga aspek infrastruktur di atas, maka pemerintah dapat memfasilitasi dengan infrastruktur yang baik yang mana sudah dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling mendasar dan dominan sering digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas masyarakat demi kelangsungan hidup. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga bisa mengurangi masalah-masalah seperti pengangguran, kesejahteraan sosial, pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Selama pengoperasian, infrastruktur jalan terus berlangsung penurunan layanan

sampai dengan umur ekonomisnya untuk mengembalikan kondisi layanan ini, perlu memperhatikan pemeliharaan jalan.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan modal bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Pembangunan infrastruktur jalan yang semakin kompleks baik di dalam maupun di luar kota, akan menimbulkan pusat-pusat kegiatan dan fungsi-fungsi perkotaan baru yang menempati tempat sepanjang jalur jalan yang ada. Pembangunan jalan tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan fasilitas kegiatan kota sebagai pusat baru. Pembangunan infrastruktur jalan, pelebaran jalan, peningkatan ruas jalan sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan baik untuk pemukiman, perdagangan maupun jasa.

Salah satu peran infrastruktur adalah menjadi faktor daya tarik investasi di tiap daerah. Dengan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik tentunya akan menjadi proses distribusi barang maupun jasa menjadi lebih cepat dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Pembangunan infrastruktur jalan juga dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, menyebabkan melambatnya laju investasi.

Penguasaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan berada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan dilimpahkan dan/atau

diserahkan kepada instansi-instansi di daerah atau diserahkan kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan dan jembatan tidak melepas tanggung jawab pemerintah. Adanya otonomi daerah, maka penyelenggaraan jalan dan jembatan dipisahkan berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur menurut Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu :

1. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional [Pasal 14 ayat (1);
2. Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi [Pasal 15 ayat (1);
3. Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa [Pasal 16 ayat (1);
4. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota [Pasal 16 ayat (2).

Peningkatan jalan dapat berupa peningkatan struktur pengerasan jalan dan juga pelebaran jalan untuk meningkatkan kapasitas jalan. Pada masa pelaksanaan ini memerlukan zona kerja untuk ruang kerja peralatan dan keselamatan kerja. Infrastruktur jalan memiliki manfaat ekonomi dan sosial. Menurut Ikhsantono (2009), kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga menimbulkan adanya transaksi.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa, manfaat sosial transportasi adalah menyediakan berbagai kemudahan, diantaranya:

- a) Pelayanan untuk perorangan atau kelompok
- b) Pertukaran atau penyampaian informasi
- c) Perjalanan untuk bersantai
- d) Memendekkan jarak
- e) Memencarkan penduduk.

Pengaruh pengembangan infrastruktur merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, jika memiliki infrastruktur jalan yang baik, maka perekonomiannya dapat mengalami peningkatan. Sebaliknya suatu daerah yang infrastruktur jalannya kurang baik atau tidak terpenuhi maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan. Peningkatan perekonomian suatu daerah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur jalan sangat penting. Perbaikan dan pembuatan infrastruktur jalan juga dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan karena akses jalan diperlukan untuk melakukan mobilitas dari suatu tempat ke tempat lain, guna kepentingan masyarakat daerah yang berada di sekitarnya. Jalan menjadi penting keberadaannya karena jalan yang memiliki penerangan yang baik dan akses yang mudah dijangkau akan membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk melakukan segala aktivitas perpindahan, terutama untuk arus pertukaran ekonomi dari suatu tempat ke tempat lain.

Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTT yang terletak di kawasan selatan dan sebagai salah satu Kabupaten terluar di NTT. Berdasarkan RT/RW Provinsi, secara hirarki struktur ruang, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua dikembangkan sebagai pusat kegiatan *local* dengan Kecamatan Hawu Mehara sebagai Kecamatan strategis di NTT. Untuk memperkuat posisi Sabu Raijua dalam konstelasi struktur tata ruang provinsi, maka di Kabupaten Sabu Raijua dikembangkan rencana jaringan jalan strategis nasional yang meliputi ruas jalan yang menghubungkan Masara-Seba-Below. Jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan adalah ruas jalan Sabu Timur-Sabu Barat-Hawu Mahara. Rencana penyebrangan transportasi penyeberangan akan dikembangkan pelabuhan lintas kabupaten berupa pelabuhan Seba yang juga merupakan pelabuhan penumpang. Ditinjau dari aspek transportasi udara, Bandar Udara Terdamu merupakan bandar udara pengumpan. Jaringan energi listrik yang dikembangkan di pulau Sabu adalah jaringan transmisi energi listrik yang menghubungkan Sabu Timur, Sabu Barat, Hawu Mahera. Sedangkan jaringan telekomunikasi yang dikembangkan di Sabu Raijua adalah jaringan terestrial dan jaringan satelit

Penulis juga sempat melakukan wawancara di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 21 April 2021, dengan Bapak Eres Radja Haba MT, mengatakan bahwa, mengenai pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan pemerintah adalah pembangunan jalan nasional dari Bolou-Sabu Timur hingga Mesara, Sabu Barat sepanjang 40 Km telah dikerjakan dengan dana APBDN. Sementara itu, untuk pembangunan jalan Provinsi dari Saba-Liae, dan dari Saba Ege

dikerjakan di tahun 2021, termasuk dari Ledean-Teriwu-Lademanu-Lebodei. Pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintahan Provinsi NTT untuk terus mendapatkan perhatian anggaran setiap tahun, agar jalan Provinsi bisa dikerjakan, terutama ruas-ruas jalan yang sedang rusak. Tujuan dari pembangunan semua ruas jalan untuk membuka isolasi transportasi demi meningkatkan ekonomi dan mendukung pengembangan sektor wisata. Semua akses jalan utama, dan adanya interaksi antara kecamatan serta desa yang masih keterbatasan soal anggaran dapat berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi dan Kementerian PUPR di Jakarta, agar mendapatkan dukungan anggaran setiap tahun.

Pembangunan yang terjadi tidak hanya pada industri pabrik saja namun perbaikan dan pembuatan infrastruktur jalan juga dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan karena akses jalan diperlukan untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain guna kepentingan masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua. Jalan menjadi penting keberadaannya karena jalan yang memiliki penerangan yang baik dan akses yang mudah dijangkau akan membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk melakukan segala aktivitas perpindahan terutama untuk arus pertukaran ekonomi dari satu tempat ke tempat lain. Kondisi jalan di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada table 1.1

Tabel 1.1

Data Total Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020

Panjang Ruas km	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)			Panjang Tiap Kondisi							
				Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	Aspal	Krikil	Tanah	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
571.000	31.66	26.06	24.28	148.00	25.92	30.600	5.36	2.200	0.39	390.200	68.34

(Sumber: Kantor Dinas PUPR Sabu Raijua Tahun 2020).

Dari tabel 1.1 di atas, Kabupaten Sabu Raijua memiliki panjang jalan mencapai 571.000 (km) di tahun 2020 yang ada di Pulau Sabu, Raijua dan Dana. Panjang tipe permukaan mencapai 82 (%) yang terdiri dari jalan aspal, krikil, dan tanah. Panjang ruas jalan aspal mencapai 31.66 km, panjang ruas jalan krikil mencapai 26.06 km, panjang ruas jalan tanah mencapai 24.28 km. Panjang jalan dan tiap kondisi: kondisi jalan dalam keadaan baik mencapai 148.00 km, kondisi jalan rusak sedang mencapai 30.600 km, kondisi jalan rusak ringan 2.200 km, sedangkan kondisi jalan rusak berat mencapai 390.200 km sehingga total panjang jalan secara keseluruhan mencapai 571.000 km. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sabu Raijua masih diperlukan pengembangan atau pembangunan berkelanjutan karena beberapa jalan dalam kondisi rusak berat masih belum terbangun. Beberapa tahapan dalam pembangunan yaitu melalui komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta hasil mufakat antara pemerintah dengan masyarakat agar diterima

dengan baik, sehingga implementasi pembangunan jalan berhasil dan terlaksana dengan baik.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa, Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sabu Raijua agar sesuai dengan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sabu Raijua”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sabu Raijua?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sabu Raijua

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sabu Raijua.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sabu Raijua.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan suatu masukan mengenai infrastruktur jalan di Kabupaten Sabu Rijua dalam waktu yang akan datang

2. Akademis

- a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian mengenai proses pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sabu Raijua.
- b. Bagi penulis, selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan bidang ilmu administrasi.
- c. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berfikir secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang.